

RINGKASAN

SITI AISYAH
200510258

Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe)
(Harun, S.H., M.H Dan Dr. Ramziati, S.H., M.Hum)

Badan Narkotika Nasional (BNN) berperan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika serta menyediakan layanan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu. Peran rehabilitasi bertujuan memulihkan kesehatan fisik, mental, dan sosial pecandu narkotika. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menetapkan rehabilitasi sebagai bagian dari hukuman baik yang terbukti bersalah maupun tidak, dengan masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa hukuman. Hal ini menggeser pandangan bahwa pecandu adalah korban, bukan hanya pelaku kriminal. Namun, masih terdapat tantangan hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan rehabilitasi tersebut, serta mengeksplorasi upaya penyelesaian yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi bagi korban.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik observasi dan wawancara. Penelitian dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe. Teknik pengumpulan data terdiri dari penelitian lapangan dan kepustakaan, diikuti analisis data kualitatif untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil penelitian dengan runtut, logis, dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe mencakup rehabilitasi medis untuk mengobati ketergantungan serta rehabilitasi sosial untuk pemulihan fungsi sosial, dimulai dengan detoksifikasi dan diikuti oleh konseling dan pelatihan keterampilan. Namun, meskipun ada dasar hukum, hanya 137 dari 230 korban yang mendapatkan rehabilitasi dari 2018 hingga 2023, sedangkan 93 korban masih terabaikan, disebabkan oleh stigma sosial, keterbatasan sumber daya, dan penolakan rehabilitasi oleh hakim. Untuk mengatasi hambatan ini, BNNK Lhokseumawe melakukan penyuluhan, pengawasan pascarehabilitasi, dan meningkatkan kapasitas masyarakat, sambil menjalin kerja sama dengan lembaga penegak hukum guna memastikan akses rehabilitasi yang lebih baik, terutama bagi pengguna dari kalangan ekonomi rendah, sehingga dukungan keluarga dan masyarakat dapat mempercepat proses pemulihan dan mengubah stigma terhadap pengguna narkotika.

Saran yang dapat diberikan adalah BNNK Lhokseumawe agar meningkatkan fasilitas untuk mendukung proses rehabilitasi yang lebih efektif.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Korban, Penyalahgunaan Narkotika.

SUMMARY

**SITI AISYAH
200510258**

***Implementation of Medical and Social Rehabilitation for Victims of Narcotics Abuse According to Law Number 35 of 2009
(Research Study at the National Narcotics Agency of Lhokseumawe City)
(Harun, S.H., M.H And Dr, Ramziati, S.H., M.Hum)***

The National Narcotics Agency (BNN) plays a role in preventing and eradicating drug abuse and providing medical and social rehabilitation services for addicts. The role of rehabilitation aims to restore the physical, mental, and social health of drug addicts. Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics stipulates rehabilitation as part of the punishment for those found guilty or not, with the rehabilitation period being counted as the sentence. This shifts the view that addicts are victims, not just criminals. However, there are still legal challenges in implementing rehabilitation optimally.

This study aims to analyze the implementation of medical and social rehabilitation for victims of drug abuse at the National Narcotics Agency of Lhokseumawe City in accordance with Law No. 35 of 2009, identify obstacles faced in implementing the rehabilitation, and explore efforts to resolve the issues made to increase the effectiveness of rehabilitation for victims.

This study uses an empirical legal method with observation and interview techniques. The study was conducted at the National Narcotics Agency of Lhokseumawe City. Data collection techniques consist of field research and literature, followed by qualitative data analysis to describe and interpret the research results in a coherent, logical, and systematic manner.

The results of the study indicate that the implementation of medical and social rehabilitation for victims of drug abuse according to Law Number 35 of 2009 at the Lhokseumawe City National Narcotics Agency includes medical rehabilitation to treat dependence and social rehabilitation to restore social function, starting with detoxification and followed by counseling and skills training. However, despite the legal basis, only 137 of the 230 victims received rehabilitation from 2018 to 2023, while 93 victims were still neglected, due to social stigma, limited resources, and rejection of rehabilitation by judges. To overcome these obstacles, the Lhokseumawe BNNK conducts counseling, post-rehabilitation supervision, and increases community capacity, while collaborating with law enforcement agencies to ensure better access to rehabilitation, especially for users from low-income groups, so that family and community support can accelerate the recovery process and change the stigma against drug users.

The suggestion that can be given is for BNNK Lhokseumawe to improve facilities to support a more effective rehabilitation process.

Keywords: *Rehabilitation, Victims, Drug Abuse.*